

BAB II

GAMBARAN UMUM TEGAL

A. Kondisi Geohistoris dan Demografis

Afdeling atau Kabupaten Tegal luasnya hampir 600 km persegi mempunyai bentuk segitiga yang bersudut lancip lereng gunung Slamet, dengan tinggi 3.472 kaki. Alas segitiga yang tidak terlalu lebar itu terletak di pantai lautan Jawa. Daerah itu terbatas di sebelah timur dengan daerah Pemalang dan di sebelah barat dengan daerah Brebes. Jadi daerah Tegal yang berbentuk segitiga seolah-olah merupakan baji dengan matanya yang runcing membelah antara daerah Pemalang dan Brebes (Suputro, 1959: 55).

Tegal semula berupa desa kecil yang terletak di tepi muara Kali Gung, dengan nama Tetegal. Didirikan pada kira-kira tahun 1580. Karena tempat itu dipandang ada harapan baik di kemudian hari, maka oleh Ki Gede Sebayu diperbesar. Tetegal merupakan bandar yang mengeluarkan hasil bumi dari daerah Tegal, yang semula perairannya diatur oleh Ki Gede Sebayu waktu berdiam di Danawarih. Karena daerah yang luas itu umumnya merupakan daerah ladang (Tetegalan), maka oleh Ki Gede Sebayu dinamakan Tegal.

Setelah daerah itu maju, Ki Gede Sebayu diangkat menjadi sesepuhnya, dengan pangkat Jurudemung (demang) yang pada waktu itu merupakan daerah Kabupaten Pemalang. Setelah Ki Gede Sebayu meninggal dimakamkan di Danawarih, dan putranya Ki Gede Honggowono ditunjuk sebagai penggantinya (Depdikbud Kab Tegal, 1984: 37).

Tegal berlambang “Banteng loreng binoncengan” yang berarti “Seekor banteng yang berwarna belang-belang dinaiki oleh seorang anak kecil”. Lambang ini menggambarkan tabiat penduduk Tegal yang gagah berani (banteng) dan agak kasar (loreng), akan tetapi pada hakekatnya dapat dituntun oleh orang yang lemah lembut dan ramah tamah serta tak mempunyai maksud yang buruk (Su’ud, 2003: 48).

Daerah Tegal terbagi menjadi dua daerah pengawasan. Daerah pengawasan Tegal yang terdiri dari kawedanan Tegal dengan ibukota Mangkukusuman, Adiwerna, dan Suradadi dan pengawasan Procot yang meliputi kawedanan Slawi, Pangkah, Balapulung, Bumijawa dan Jatinegara. Jumlah desa seluruhnya ada 386. Lajur bagian utara daerah Tegal terdiri dari tanah aluvial yang lebar. Adapun di sebelah selatan lajur ini tanahnya terdiri dari tanah kwartair. Bagian tengah terdiri pegunungan tersier yang termasuk jenis *mergeletage*, sedangkan bagian selatan daerah Tegal, yaitu tepat di lereng gunung Slamet tanahnya vulkanis.

Sungai-sungai yang penting ada dua buah di daerah ini, yaitu Kali Rambut dan Kali Gung. Kedua-duanya bermata air di Gunung Slamet. Kali Rambut juga merupakan batas antara daerah Tegal dan Pemalang. Cabang-cabang Kaligung ini hanya sebagian saja yang mengalir di daerah Tegal, yaitu melalui sisi ibukota kawedanan Slawi, Adiwerna dan ibukota daerah Tegal. Dataran rendah, air Kali Gung ini sebagian besar dipakai untuk mengairi sawah dan ladang. Lain dari pada itu, di daerah Tegal terdapat juga tujuh buah pabrik gula yang bekerja dengan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan rakyat (Su’ud, 2003: 57). Di Slawi

dibuat bendungan yang besar dan kuat untuk menampung air dari sungai Jembangan, Wadas dan Bliruk. Bendungan itu lokasinya di Kemanglen (bekas pabrik gula). Hasil bumi menjadi berlipat, Tegal banyak menimbun hasil bumi yang dikirim ke luar daerah dan penduduknya makin banyak, akhirnya berubah menjadi kota yang cukup bisa diharapkan di kemudian hari. Pelabuhan Tegal yang ramai pada waktu itu di muara Kali Gung sebelah barat kota Tegal, kini bernama Muaratua (Tegalsari). Tetapi kemudian pindah ke muara timur sebelah timur (pelabuhan yang sekarang). Kesimpulannya Tetegal merupakan delta dari Kali Gung (Depdikbud, 1984: 38).

Luas wilayah 878,79 km² Kabupaten Tegal secara geografis terletak pada koordinat 108°57'6"-109°21'30" BT dan 6°50'41" - 7°15'30" LS. Panjang garis pantai 30 Km dan panjang perbatasan darat dengan Negara lain adalah 27 Km. Wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari daratan seluas 87.878,56 ha dan lautan seluas 121,50 km². Wilayah daratan kabupaten ini mempunyai kemiringan bervariasi, mulai dari yang datar hingga sampai yang curam. Kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-2°) seluas 24.547,52 ha (Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja), tipe bergelombang/dataran (2-15°) seluas 35.847,22 ha (Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah), tipe curam/berbukit-bukit (15-40°) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>40°) seluas 7.099,97 ha (Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng). Kondisi

dataran tersebut, diantaranya berpa wilayah hutan, persawahan dan ladang yang cukup luas (www.tegalkab.go.id).

Kota ini pernah menjadi ibukota karesidenan, yang terdiri dari daerah Tegal, Pemalang dan Brebes. Sejak tahun 1901, Tegal menjadi ibukota kabupaten dan daerah Tegal. Kota ini terletak di pantai Lautan Jawa yang dilintasi jalan raya pos dan *stoomtram* (kereta api) Semarang-Cirebon. Adapun bagian timur dari kota Tegal ini, seolah-olah diiris oleh Kali Gung. Muara sungai ini dahulu digunakan sebagai *havenkanaal* terusan susukan pelabuhan yang diperlengkapi dengan dam yang diletakan melintang ke laut. Akan tetapi dam itu ternyata tidak memenuhi kebutuhan, karena di menara sungai Gung tersebut terjadi timbunan pasir.

Pada tahun 1879 diadakanlah dinas *stoombaggermolen* (dinas kapal keruk) yang menjamin supaya pelabuhan itu selalu mencapai kedalaman yang diperlukan, walaupun keadaan muara dengan usaha tersebut menjadi lebih baik, akan tetapi kadang-kadang pelayaran masih juga mendapat rintangan, disebabkan timbunan pasir di muara sungai ini selalu saja terjadi

Dengan demikian maka kapal keruk tersebut selain sibuk dengan pekerjaannya, yaitu menjaga supaya muara tetap terbuka bagi lalu lintas perkapalan. Juga sebagai usaha memperbaiki lalu-lintas perkapalan di pelabuhan, maka muara Kali Gung dipindahkan 1 km ke sebelah timur yang disebut Kalianyar, sehingga terusan pelabuhan ini terpisah dari sungai

Tegal juga memiliki infrastruktur jalan utama yang membentang sepanjang pantai utara. Jalan ini merupakan Jalan Pos (*Groote Posweg*) atau masyarakat umum lebih mengenalnya dengan jalan Daendels. Jalan ini

membentang dari barat wilayah karesidenan Cirebon hingga memasuki Tegal mempunyai panjang 59 paal. Disamping itu banyak pula jumlah jalan-jalan lebar yang lain yang keluar dari jalan raya pos ini. Jalan-jalan tersebut di tempat pertemuannya dengan jalan raya pos, merupakan sudut siku-siku. Sedikit sekali dari jalan-jalan ini yang telah ditanami dengan pohon asem dan johar. Penduduk Eropa bertempat tinggal di sebelah utara jalan raya pos, berdekatan dengan pantai yang berpasir, mengelilingi tanah lapang yang berbentuk segi empat, yaitu alun-alun utara di muka Balai Kota sekarang. Kantor residen yang dulu, yang kemudian dijadikan kantor asisten residen dan juga sebuah benteng kecil berdiri ditempat itu. Sekarang benteng itu tidak lagi dipergunakan sebagai benteng, tetapi digunakan sebagai rumah penjara.

Posisinya yang berada pada perlintasan Jalan Pos menuju Semarang hingga menghubungkan Surabaya, menjadikan posisi Tegal berada pada perlintasan lalu lintas yang penting dan strategis. Selain itu juga terdapat jalan ke arah selatan yang menghubungkan dengan Karesidenan Banjoemas. Perkembangan infrastruktur transportasi semakin berkembang, ketika di tahun 1886, mulai dibuka rute jalur kereta api oleh perusahaan *Semarang Cheriboon Stroomtram Maatschappij*. Kampung Tiong Hoa berada disebelah selatan jalan raya pos. Diantara penduduk bangsa Indonesia yang tinggal di Tegal ada yang menjadi tukang kayu, pandai logam, pemahat batu dan pencelup kain yang pandai (Suputro, 1959: 57).

Selain itu Tegal juga memiliki pelabuhan yang dikenal sejak kekuasaan Mataram dan menjadi strategis terkait era *culturstelsel* dan kapitalisme

perkebunan. Daya dukung pelabuhan Tegal secara geografis disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: (1) ombak yang bersahabat dan memungkinkan kapal-kapal berlabuh, (2) tidak adanya batu karang dalam perairan sekitar pelabuhan, dan (3) letak pelabuhan yang menghubungkan daerah *hinterland* melalui sungai Gung. Selain sebagai pertanian, kawasan Tegal mulai bergeliat saat dikenalnya komersialisasi lahan perkebunan tebu dimulai pada pertengahan abad XIX. Proses ini makin berkembang secara ekstensif sebelum masa Depresi. Komoditas gula merupakan komoditas terpenting di Hindia Belanda. Bahkan pulau Jawa mampu mengekspor produk gula mengungguli Kuba hingga pertengahan tahun 1920-an. Sementara eksploitasi tanah untuk keperluan penanaman tebu di kawedanan Tegal karesidenan Pekalongan sampai tahun 1930-an mencapai 31% dari total lahan pertanian sawah. Industri gula tumbuh pesat di karesidenan Pekalongan sebagai konsekuensi industrialisasi perkebunan. Pesatnya industri gula berpengaruh dalam pertumbuhan infrastruktur kota di Tegal. Salah satunya adalah jaringan transportasi kereta api. Memang jauh sebelum pembangunan rel kereta api di wilayah Tegal terbentuk, jalur utama seperti jalan *grootte postweg* dan jalan-jalan yang menghubungkan wilayah pedalaman dan kawasan sekitarnya telah terbentang luas sejak tahun 1841. Namun pada masa hujan, kerap terjadi banjir yang merusak jalan dan jembatan. Kerusakan jalan akibat banjir ini berdampak pada pengangkutan hasil komoditas perdagangan. Rencana pembuatan jalan kereta api sebagai jalur alternatif pengganti jalan mulai digagas pada 18 Januari 1882, yang membuka jalur Tegal-Balapulang melalui Banjaran dan Slawi. Dari Banjaran percabangan akan menghubungkan daerah ke wilayah Pangkah. Makna

pembuatan jalur rel kereta api itu diantaranya untuk mempermudah jalur pengangkutan komoditas gula seperti di Pangkah dan Balapulang. Dengan kata lain pembukaan jalur kereta api makin memudahkan pengiriman hasil perkebunan di pedalaman Tegal menuju pelabuhan Tegal. Pembangunan pelabuhan niaga sebagai pendukung transportasi komoditas perkebunan yang sudah ada semasa *culturstelsel*. Di kawasan pelabuhan Tegal terdapat gudang-gudang penyimpanan kopi dan gula.

Dinamika Tegal menjadi wilayah ini memiliki sejarah panjang tentang resistensi terhadap kapitalisme perkebunan. Kawasan industri gula berpusat di Pangkah, Pagongan, Kemanglen, Balapoelang, Doekoehwringin, Kemantran dan Adiwerna menjadi oase subur perlawanan tersebut. Berdasarkan *staatsblad* tersebut wilayah *regenschaap* Tegal, daerah Pangkah termasuk dalam *controle afdelingen* Protjot bersama Slawi dan Balapoelang. Memiliki luas wilayah 95 km persegi dan terbagi dalam 2 distrik yakni Pangkah dan Kedoengbanteng serta terdiri dari 38 desa. Keberadaan pabrik gula di Pangkah membuat wilayah ini menjadi tempat hunian masyarakat Eropa dan Cina. Walaupun jumlah tak sebanyak daerah Slawi yang mencapai 1100 masyarakat Eropa dan China dengan jumlah penduduk pada tahun 1905, 89.000 jiwa. Sama seperti Pangka, Slawi juga terdapat pabrik gula yakni Doekoehwringin (*Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, 1919: 288).

Dengan ordonansi tahun 1906 kota Tegal dijadikan gemeente, (Ordonantie tanggal 21 Februari 1906, Staatsblad 1906 No. 123 yang berlaku hingga pada april 1906). Dalam pasal 2 dari ordonansi itu disebutkan bahwa, untuk gemeente Tegal

disediakan uang sebesar Rp. 11.000,- diambil dari penghasilan koloni. Pada tanggal 1 April 1906 dilantiklah Dewan Kota Tegal yang pertama. Anggota-anggotanya yang berjumlah 13 orang diangkat oleh G.G. Van Hoogendorff. Asisten residen Tegal bertindak sebagai ketua dewan.

Kota Tegal semakin lama semakin maju, berkat letaknya yang baik; yaitu pada titik pertemuan antara jalan kereta api maupun jalan raya dari Jakarta ke Surabaya, dan dari Tegal ke Purwokerto. Pelabuhan yang baik, yang sejak 1871 diperbaiki dan dilengkapi dengan *havendammen* serta *stijgers*, lagi pula letaknya di tengah-tengah Nusantara ini memberi kesempatan untuk mengeksport hasil bumi dari daerah kabupaten Tegal, Brebes serta Pemasang yang kaya akan beras, gula tetes, kopi, kapuk, kayu jati, dsb. Dengan adanya pabrik gula di sekitarnya, serta pabrik-pabrik beras dan tekstil di dalam dan di luar kota, maka timbullah pabrik-pabrik mesin dan bank-bank di kota Tegal.

Daerah pegunungan merupakan daerah yang subur dengan hasil pertanian seperti kopi, teh, kayu jati, Pinus. Didalam pemerintahan Belanda kopi merupakan hasil ekspor utama didaerah ini disamping teh dan gula, karet, kina dan panili. Penduduk Tegal yang lain bermata pencaharian sebagai nelayan dikarenakan wilayah Tegal bagian utara adalah lautan dan pantai penghasil perikanan, selain perikanan penduduk juga mengusahakan ternak (Su'ud, 2003: 61).

Pada akhir tahun 1917, penduduk daerah Tegal berjumlah kurang lebih 595.000 jiwa, yang terdiri: 585.000 orang Indonesia, 6.900 orang Tiong Hoa, 1.700 orang Eropa dan 1.000 orang Arab, diantaranya termasuk orang-orang asing dari Asia lainnya (Su'ud, 2003: 57).

B. Keadaan Masyarakat Tegal Sebelum Kemerdekaan

a. Masa Penjajahan Belanda

Semenjak tahun 1830 hingga tahun 1870, di Hindia Belanda diberlakukan Sistem tanam paksa (*cultur stelsel*) yang menjadikan Pulau Jawa sebagai daerah perkebunan besar untuk ekspor gula, nila, teh, kopi dan lain-lain. Sejak berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830, seluruh Jawa telah berada di bawah kontrol Belanda (Setiawan, 1998: 91). Kondisi semacam ini memberi peluang munculnya negara baru, yang kemudian disebut *colonial state* (negara kolonial). Institusi kekuasaan inilah yang kemudian berkembang menggantikan sistem kekuasaan lama dan lewat pemekaran kekuasaannya terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti dalam komposisi kekuasaan Jawa lewat kelahiran sekelompok penguasa pribumi dan elite birokrasi tradisional. Raja-raja di Jawa ditempatkan dibawah pengawasan yang sangat ketat. Pemerintah Belanda menyebutkannya “menempatkan diri di bawah perlindungan pemerintah kolonial Belanda” (Onghokham, 1985: 7).

Tahun 1830 Gubernur Jendral Van Den Bosch mengadakan peraturan tanam paksa yang sangat memberatkan rakyat. Seperlima dari tanah rakyat harus ditanami tanaman yang telah ditentukan Hindia Belanda. Bagi rakyat yang tidak punya tanah harus menyediakan tenaganya sehari tiap sepekan (lima hari) yang berarti seperlima dari penghasilan itu untuk pemerintah Hindia Belanda.

Hasil tanam paksa untuk daerah Kabupaten Tegal misalnya gula dan kopi banyak ditimbun di pelabuhan Tegal dan di Bumijawa (terkenal dengan gudang kopi di Bumijawa dan Tegal). Hasil gula dan hasil bumi lainnya ditimbun di

gudang NHM di pelabuhan Tegal untuk dikirim ke negara lainnya (Depdikbud Kab Tegal, 1984: 60).

Pada permulaan tanam paksa, para pangreh praja ditawarkan untuk memilih menerima gaji atau mendapatkan tanah. Jadi, para pangreh praja mendapatkan gaji dari pemerintah Hindia Belanda, sembari mempertahankan sistem lama: upeti, kerja bakti, dan sebagainya. Pada masa ini pula mulai tumbuh kemewahan para bupati.

Dengan memilih gaji pada pemerintah Hindia Belanda dan tidak memilih tanah, elite Jawa sebetulnya membuat kesalahan pada awal tanam paksa tahun 1830. Tanah-tanah bupati lambat laun jatuh ketangan Hindia Belanda. Lebih-lebih ketika pemerintah Hindia Belanda melakukan pembelian atas tanah pada tahun 1660-an.

Selain itu, para pangreh praja juga tetap menjalankan lembaga-lembaga tradisional yang berlaku dalam sistem lama seperti upeti, kerja bakti untuk priyayi dan sebagainya. Inilah yang melahirkan eksploitasi ganda terhadap masyarakat. Para pejabat pemerintah Hindia Belanda menyaksikan kenyataan ini, tetapi sengaja mendiamkannya. Dasar pertimbangannya adalah, peranan pangreh praja sangat dibutuhkan dalam *cultur stelstel* (Onghokham, 1985: 6). Hal ini dibuktikan dengan ditempatkannya pangreh praja sebagai pegawai yang mengawasi berfungsinya sistem tanam paksa tersebut. Dari sinilah mulainya proses disintegrasi atau ketidakharmonisan antara pangreh praja dengan rakyatnya. Dalam melaksanakan fungsinya, pangreh praja seringkali bertindak diluar batas, bahkan lebih kejam dari perlakuan pemerintah kolonial Belanda.

Akhirnya rakyat menganggap pangreh praja hanya sebagai alat kekuasaan asing (Kahin, 1979: 11).

Dalam pelaksanaan tanam paksa rakyat banyak dirugikan, daripada merasakan keuntungannya. Dalam pelaksanaan tanam paksa, rakyat Tegal mendapat keuntungan berupa:

1. Saluran perairan sawah-sawah (irigasi) diperbaiki
2. Jalur lalu lintas yang menghubungkan antar desa diperbaiki
3. Dengan adanya kereta api, pengangkutan menjadi lebih lancar, dan banyak hasil bumi yang bisa dijual ke lain daerah
4. Pendirian pabrik-pabrik gula Pangkah, Dukuhwringin, Kemanglen, Pagongan, Balapulang, Ujungrusi dan Kemantran menampung tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran.

Tahun 1867, De Waal, Baron Van Hoevel dan Multatuli (Edward Douwes Dekker) melalui Volksraad mengusulkan agar tanam paksa dihapuskan, sebab memberatkan rakyat. Multatuli juga mengarang buku yang berjudul Max Havelaar yang menggambarkan penderitaan rakyat pada masa itu.

Pemerintah Hindia Belanda lalu mengadakan peraturan penghapusan tanam paksa tahun 1870, tetapi baru tahun 1915 tanam paksa itu hapus sama sekali (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 1984: 61).

Pada tahun 1858 di Tegal terjadi peristiwa yang dikenal orang dengan nama peristiwa “Brandal Mas Cilik dan Mas Gendon”. Awal mula peristiwanya, setelah Bupati Tegal Reksonegoro VI meninggal dunia dan untuk penggantinya dicalonkan R.M. Ore (Tumenggung Panggar), ialah putra nomor dua dari

Reksonegoro VI. Tetapi karena masih kecil, pemerintah Hindia Belanda menanggukannya, untuk sementara diangkat Tumenggung Sosronegoro sebagai Bupati dengan status wakil Bupati. Sayang Tumenggung Sosronegoro baru menjabat 2 tahun lalu meninggal. Tumenggung Sosronegoro termasuk dalam wangsa Jaka Tingkir, karena itu lalu membangun astana K.A Balamoa di Balamoa.

Patih Tegal, Mas Rangga Suradipura menghendaki kedudukan wakil Bupati tetapi pemerintah Hindia Belanda mengangkat Tumenggung Sosronegoro jaksa Pekalongan menjadi wakil Bupati Tegal. Mas rangga merasa tidak puas, kemudian meminta bantuan kepada Lurah Randugunting, Mas Cilik namanya untuk mengadakan pemberontakan. Mereka meminta bantuan kepada Mas Sangkip dan Mas Gendon dari Pekalongan. Kedua orang itu terkenal sebagai orang yang sangat ugal-ugalan. Dengan gembira tawaran itu diterima dengan maksud agar mendapatkan untung yang besar dan nanti mendapat kedudukan yang sepadan dengan jasanya. Mas Gendon dan Mas Sangkip segera memulai mengadakan kekacauan-kekacauan. Makin lama makin meluas dan timbul perang terbuka. Mas Cilik Lurah desa Randugunting terlibat dalam pemberontakan itu, dan memimpin langsung. Mas Cilik juga mengharpkan agar nanti bila berhasil mendapat kedudukan yang baik di Kabupaten Tegal (Depdikbud Kabupaten Tegal, 1984: 63).

Mas Sangkip dan Mas Gendon minta kesaktian kepada seorang dukun yang bernama Nyai Kasbunah dari Desa Panggung. Masing-masing diberikannya selebar jubah yang dibuat dari kain putih dengan pesan jika mereka nanti dalam

perjalanan menuju Kabupaten telah sampai diperempatan jalan, maka supaya jubah ini dipakai dan memanggil-manggil orang banyak agar menggabungkan diri dengan mereka (Su'ud, 2003: 55).

Mas Cilik, Mas Gendon dan Mas Sangkip terus memimpin pemberontakan. Pemerintah Hindia Belanda memberangkatkan serdadunya/tentara ke daerah Semedo untuk menghancurkannya. Mas Cilik yang bersarang di Kaliori terpaksa bertahan dengan sekuat tenaga. Penduduk banyak yang lari ke lain desa, sebab dipaksa harus menyerahkan makanan atau menjadi pengikutnya.

Mas Cilik dan kawan-kawannya tidak kuat melawan serangan yang dilancarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan Mas Cilik serta Mas Gendon tewas. Sedangkan Mas Sangkip lari ke Barat, tetapi di Desa Kemiriamba (Jatibarang) dapat ditangkap, karena waktu diadakan pemeriksaan kurang memberi jawaban yang jelas, lalu dibunuh oleh Wedana Jatibarang. Wedana Jatibarang dipersalahkan menghakimi sendiri dan menghilangkan jejak dalam pengusutan perkara. Wedana Jatibarang diberhentikan dari jabatan.

Mas Ranga Suradipa dianggap cakap dalam memberantas pemberontakan, karenanya oleh pemerintah Hindia Belanda ditetapkan menjadi Bupati Tegal, dan menjabat antara tahun 1859-1862 (Depdikbud Kabupaten Tegal, 1984: 63).

Karesidenan Pekalongan menjadi sebuah pusat dari kegiatan politik yang radikal, dan para pengikut PKI di Tegal dan Pekalongan adalah tokoh-tokoh

penggerak terkemuka dalam pemberontakan melawan Belanda pada tahun 1926 (Kahin, 1995: 31).

Setelah Sarekat Islam pecah pada tahun 1923, banyak cabang Sarekat Islam menjelma menjadi Sarekat Rakyat, suatu organisasi yang didirikan PKI untuk para petani yang sealiran dan berada diluar pusat-pusat kota. Menjelang Januari 1926 jumlah anggota Sarekat Rakyat cabang Tegal sekitar 3.500 orang.

Pada akhir Februari 1926 situasi politik di Tegal dan Pekalongan memantapkan golongan komunis untuk memberontak terhadap penguasa, terutama dengan adanya ranting-ranting partai di sepanjang pantai antara Cirebon dan Pekalongan. Sarekat Buruh Kereta Api berperan sebagai penghubung utama antara kota dan pedalaman.

Pada bulan Maret 1926 suatu pemberontakan terlalu awal meletus di Tegal yaitu tepatnya di Dukuh Karangcegak, Kecamatan Tarub, dan kemudian ada tiga kali usaha untuk memberontak, yaitu pada bulan agustus dan september pada tahun itu pula. Peristiwa tersebut merupakan salah satu akibat dari ketidakpuasan rakyat, disamping pajak yang dipungut, keharusan untuk bekerja di Kecamatan pun dirasakan oleh rakyat sangat berat. Mulai tanggal 24 Februari 1926, menjadi penjaga dan peronda merupakan tugas kewajiban. Kewajiban ini ditentang oleh suatu kelompok yang disebut “Persaodaraan Setia Hati” yang dipimpin oleh Suleiman, seorang tokoh Sarekat Rakyat. Walaupun Suleiman dan kawan-kawannya telah ditangkap, rakyat tetap melanjutkan tindakan menentang tugas kewajiban itu. Karena itu Wedana Adiwerna dan Camat Tarub datang ke Dukuh Karangcegak untuk menyaksikan keadaan sebenarnya. Adapun yang dianggap

sebagai “perlawanan” itu hanyalah wajah para petani yang menentang sewaktu mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Karena keadaan itu dianggap serius, keesokan harinya enam orang polisi didatangkan untuk mengatasi huru-hara tersebut. Polisi itulah sebenarnya menciptakan huru-hara, karena mendobrak pintu rumah para pimpinan Sarekat Rakyat yang dituduh memimpin penentangan terhadap wajib jaga tersebut, sehingga membangkitkan kemarahan yang segera mengepung Wedana. Keesokan harinya Wedana meminta bala bantuan dari polisi. Rakyat yang marah itu meningkatkan jumlahnya, lebih dari 200 orang; dengan bersenjatakan pentung, bambu runcing, dan parang pemotong tebu, mereka bersiap siaga. Sambil meneriakkan “Sabilillah” mereka menyerbu rumah seorang haji setempat, karena terdapat beberapa polisi dan agen PID yang sedang bersembunyi ditempat itu. Insiden ini membawa kerusakan perabot rumah dan luka ringan di kalangan yang bersembunyi di rumah haji. Residen Pekalongan panik dan mengirim kawat kilat kepada Gubernur Jendral di Bogor. Kemudian datanglah bala bantuan polisi dari Sukabumi, Semarang, dan Kudus ke Karangcegak untuk menumpas “pemberontakan” itu. Sejumlah 5.326 anggota Sarekat Rakyat diinterogasi atau ditahan di sembilan kecamatan dan sebanyak 3.510 kartu keanggotaan disita polisi. Dalam tahun 1926 dari Karangcegak sedikitnya 8 orang telah dibuang ke Boven Digul dan lebih 60 orang dipenjarakan di beberapa tempat di Jawa.

Di antara daerah-daerah revolusioner yang penting yaitu Ujungrusi, kota pabrik gula, di Kawedanan Adiwerna yang berpenduduk padat itu. Tokoh Ujungrusi dan pemimpin Sarekat Buruh Sugono Reksopuro yang selalu

menekankan kemiripan ajaran suci Al-Quran dengan Marxisme meninggal di dalam penjara, dan menurut Belanda ia bunuh diri. Alasan yang diberikan Belanda membangkitkan kemarahan teman-teman dan keluarganya, sehingga Belanda terpaksa menjaga makamnya selama 40 hari.

Perlawanan PKI yang meletus pada tahun 1926 menunjukkan adanya semangat tinggi tanpa organisasi partai yang kuat. Perlawanan yang meletus sebelum matang ini membuat Belanda dapat membersihkan gerakan revolusioner dengan bantuan mata-mata dan informannya. Belanda dapat menangkap seluruh pimpinan partai di Tegal dan Pekalongan sebelum 12 November 1926, yaitu tanggal yang direncanakan untuk memulai revolusi. Dengan adanya penangkapan itu banyak tempat-tempat yang telah mempersiapkan diri untuk memebontak, menjadi tidak berdaya.

Arus revolusi PKI yang maju terlalu cepat dan pecah sebelum waktunya ditahun 1926 bukanlah tidak ada kelanjutannya. Di samping kegagalan-kegagalan dan penangkapan tokoh-tokoh. Kejadian itu telah menjadikan PKI sebagai pelopor revolusioner di Tegal, yang sangat gigih telah melawan pajak-pajak, kerja paksa (*corvee*) yang berat, dan pabrik gula (Lucas, 1989: 27-28).

Hampir semua pimpinan nasionalis lokal, kalau tidak dipenjarakan di lain-lain tempat di Jawa dan Madura, dibuang atau diasingkan ke Boven Digul, Irian Barat. Semasa terjadinya pemberontakan yang terlampau pagi di Karesidenan Pekalongan itu, banyak kaum muslim pendukung Sarekat Rakyat ditangkap bersama-sama kaum pemberontak lainnya. Sekalipun kemudian pabrik-pabrik gula Belanda itu berusaha memenangkan elite agama setempat dengan mendirikan

masjid di desa-desa sekitar pabrik, namun kebanyakan pemimpin Islam di Karesidenan Pekalongan tetap saja memusuhi penguasa kolonial dan pangreh praja, dan pejabat-pejabat Jawa yang mewakili Belanda (Kahin, 1995:32).

b. Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang menyerang Indonesia dan segera menguasai Sumatra Selatan. Pada tahun 1 Maret 1942 dini hari, mereka mendarat di Jawa dan dalam waktu delapan hari, Letnan Jendral Hein Ter Poorten, Komandan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL), menyerah atas nama seluruh angkatan perang Sekutu di Jawa. Meskipun sekitar 8.000 tentara Inggris dan Amerika di Jawa yang dipimpin oleh Mayor Jendral Sitwel asal Inggris ingin meneruskan perlawanan terhadap Jepang, dan keinginan ini diketahui Belanda, Ter Poorten sudah keburu menyerah atas nama mereka tanpa berunding terlebih dulu dengan komandan mereka (Kahin, 2013: 145).

Pada umumnya, kedatangan Jepang diterima dengan penuh suka cita. Rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang datang sebagai pembebas. Kepercayaan itu semakin kuat ketika Jepang mengizinkan bendera nasional merah-putih dikibarkan dan lagu nasional Indonesia raya dikumandangkan; dua hal penting yang dulu dilarang oleh Belanda. Alasan terpenting pendudukan Jepang justru diterima oleh mayoritas kaum terpelajar Indonesia adalah karena penguasa baru tersebut lebih mampu meningkatkan status sosial ekonomi Indonesia, cukup dengan kebijakan tanpa kekerasan. Lebih lagi, dalam waktu enam bulan sejak kedatangannya, Jepang memenjarakan semua penduduk Belanda, sebagian besar

orang indo-Eropa, dan sejumlah orang Kristen Indonesia yang dicurigai pro-Belanda ke dalam kamp-kamp konsentrasi.

Jumlah personel pemerintah militer Jepang hanya sedikit. Mereka terpaksa mengambil orang Indonesia untuk mengisi lowongan hampir semua jabatan tingkat menengah atas dalam bidang administrasi dan teknis yang dulu diduduki orang Belanda atau Indo-Eropa. Jadi, hampir semua personel Indonesia Indonesia dalam bidang pemerintahan mendapat kenaikan pangkat satu, bahkan kerap mencapai dua atau tiga tingkat dalam hierarki tempat mereka bekerja (Kahin, 2013: 146). Kebanyakan pejabat-pejabat baru yang berkebangsaan Indonesia itu adalah para mantan guru dan kepindahan mereka dari sistem pendidikan mengakibatkan mundurnya standar-standar pendidikan secara tajam (Aman, 2015: 52).

Divisi ke-16 tentara Jepang merupakan tentara yang pertama mendarat di bumi Indonesia. Merekalah pelaksana tugas dari kaisar Jepang untuk membangun apa yang mereka sebut “Asia Timur Raya yang makmur dan sejahtera dibawah pimpinan Dai Nippon” dengan jalan memperoleh dan menguasai sumber alam dan manusia, khususnya bahan pangan dari Jawa guna memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Pulau Jawa semakin menjadi penting sebagai basis suplai tentara Jepang serta sebagai sumber beras dan garam bagi Malaya. Sebaliknya, Malaya sebagai satu-satunya sumber gula dan biji-bijian. Rokok, kina, dan bahan pokok logam juga merupakan ekspor penting dari Jawa.

Pada April 1942, usaha pertama Gerakan Tiga A dimulai di Jawa. Nama ini berasal dari slogan bahasa Jepang yang berarti Pemimpin Asia, Pelindung Asia

dan Cahaya Asia. Pada umumnya Gerakan Tiga A ini tidak berhasil mencapai tujuannya. Para pejabat Indonesia hanya sedikit memberi dukungan, tidak ada seorang nasionalis Indonesia yang terkemuka terlibat di dalamnya. Propagandanya ditangani secara keras sehingga pada masa awal pendudukan pun hanya sedikit orang Indonesia yang menanggapinya serius. Akhirnya memasuki awal tahun 1943, pihak Jepang mulai mengarahkan usah-usaha pada mobilisasi. Gerakan-gerakan pemuda diberi prioritas tinggi dan ditempatkan dibawah pengawasan ketat pihak Jepang (Ricklefs, 1989: 303).

Pada dasarnya, kebijakan politik Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas: yakni menghapuskan pengaruh Barat di kalangan rakyat dan memobilisasi mereka demi kemenangan tentara Jepang. Seperti halnya Pemerintah Kolonial Belanda, pemerintah militer Jepang bermaksud menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka banyak menghadapi masalah yang sama dengan yang dihadapi pemerintahan kolonial Belanda dan menggunakan banyak cara pemecahan yang sama. Namun, di tengah perang besar yang melakukan pemanfaatan maksimum atas sumber-sumber, pihak Jepang memutuskan untuk berkuasa melalui mobilisasi (khususnya Jawa dan Sumatra). Dengan berkembangnya suatu peperangan, usaha-usaha mereka semakin menggelora untuk memobilisasikan rakyat Indonesia.

Untuk menghapuskan pengaruh Barat, pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang, pelarangan pemakaian buku-buku yang berbahasa Belanda dan Inggris, serta membuat pendidikan yang lebih tinggi. Kalender Jepang diperkenalkan untuk

tujuan-tujuan resmi, patung-patung Belanda diturunkan, jalan-jalan diberi nama baru, begitu pula sekolah-sekolah diberi model baru. Suatu kampanye propaganda yang intensif dimulai untuk meyakinkan rakyat Hindia Belanda bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang yang luhur untuk membentuk suatu tatanan baru di Asia. Para petani pun diberi pesan ini melalui pengeras-pengeras suara radio yang dipasang di tiang-tiang desa. Akan tetapi, upaya propaganda ini sering mengalami kegagalan karena adanya kenyataan-kenyataan pendudukan Jepang, yaitu dengan adanya kekacauan ekonomi, teror, kerja paksa, dan penyerahan padi, kesombongan, dan kekejaman orang-orang Jepang pada umumnya, bahkan pemukulan dan pemerkosaan serta kewajiban memberi hormat kepada setiap orang Jepang. Orang-orang pribumi yang telah menyambut baik orang-orang Jepang sebagai pembebas seringkali dengan cepat menjadi kecil hati (Ricklefs, 1989: 300-301).

Pada tanggal 17 Maret 1942 Jepang tiba dikaresidenan Pekalongan, saat wilayah ini belum pulih dari pergolakan sosial dan huru-hara dengan jatuhnya pemerintah kolonial. Tatkala terjadi pendaratan Jepang di Jawa, penguasa kolonial berusaha melaksanakan rencana sabotase yang dipersiapkan secara tergesa-gesa atas gedung, jembatan, dan instalasi di sekitar Tegal dan Brebes, termasuk tangki penyulingan minyak juga dihancurkan (Aman, 2015: 47).

Di Tegal, setelah Jepang mendarat maka pemerintahan di dalam kota diserahkan kepada pemerintahan kota. Mr. M. Besar yang tadinya menjabat *advocaat* dan *procureer* di Tegal diangkat menjadi kepala kota (*sityo*). Kemudian ia diganti oleh R. Sungeb Reksoatmodjo, yang menjabat Patih Pekalongan. Waktu

Jepang di Tegal yang menjabat Bupati RT Slamet Kartonegoro, tahun 1942 diganti dan di tunjuk Mr. M. Besar yang semula menjabat walikota.

Setelah Mr. M. Besar diangkat menjadi *Fuku Syutyoo* (wakil Residen) di Pekalongan, maka R. Soenarjo menjadi Bupati Tegal.

Beberapa ketentuan masa pendudukan Jepang mulai dipraktekkan:

1. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku semasa pemerintahan Hindia Belanda tidak berlaku. Oleh Jepang diberlakukan *Osamu serei*, semacam peraturan pemerintah.
2. Berdasarkan *Osamu Serei* No 13 Tahun 2603 (1943 M) Stads Geemente Tegal diubah menjadi Tegal Si. Kepala daerah Tegal Si adalah *Si Tyo*, dipercayakan kepada Mr. M. Besar Martokusumo.
3. Wilayah Tegal *Si* adalah wilayah Kotamadya Dati II Tegal (sebelum diperluas 1986), teebagi dalam 10 Desa dengan 1 (satu) kecamatan yang dinamai *San Tyo*. Desa yang dinamai *Ku Tyo*. Misalnya desa Randugunting dinamai Randugunting Ku. Di masing-masing desa dibentuk kelompok lingkungan masyarakat RT *Tonari Kumi* dengan pimpinan kelompok RT *Tonari Kumityo*. Beberapa RT dikoordinir seorang *Astyoo*.
4. Sifat pemerintah adalah bersifat otonom. Peraturan Daerah (*Zoorci*) dapat berlaku setelah disahkan oleh *Siu Tyo* (Gubernur).

Mr. M. Besar Martokusumo di samping sebagai *Si Tyo* merangkap sebagai Ken Tyo (Kabupaten Tegal). Pada tahun 1943 Mr. Moh. Besar Martokusumo dikukuhkan sebagai *Si Tyo*, jabatan Ken Tyo dipercayakan kepada R Sungeb Reksoatmodjo, bekas Patih Pekalongan (Yono, 2008: 66).

Bangsa Belanda yang berada di Tegal pada waktu itu ditawan Jepang dibekas rumah dinas Walikota Tegal (kini menjadi Kantor Dinas Kesehatan) dan di Kalimati Kelurahan Panggung. Semua tahanan kekurangan makanan, juga seluruh rakyat Tegal pada masa Perang Dunia II kekurangan makanan, sebab bahan makanan diangkut Jepang untuk mencukupi kebutuhan medan perang (Yono, 2008: 64).

Penduduk harus kerja bakti untuk keperluan perang, antar lain membuat kubu-kubu pertahanan di Prupuk dan di pantai Tegal. Banyak rakyat dijadikan Romusha, dibawa ke Negeri Siam, Burma dan sebagainya untuk membantu membuat jalan kereta api, jembatan, mengaspal jalan-jalan dan sebagainya. Umumnya orang-orang itu tidak dapat kembali ke Indonesia (Depdikbud Tegal, 1984: 68).

Kewajiban menyettor padi kepada penguasa Jepang merupakan kewajiban terberat bagi mayoritas diantara sekian banyak kebijaksanaan politik Jepang di masa itu. Petani diwajibkan menyettor pajaknya kepada negara. Dengan adanya politik menyediakan cadangan beras yang dimulai pada tahun 1943 guna menghadapi kemungkinan bahaya serangan dari selatan. Distribusi beras antara lain untuk kepentingan “semi militer” yaitu pendukung-pendukung pentingnya antara lain pegawai pangreh praja. Sebagian besar elite yang berpendidikan Barat ini memang berdiam di kota-kota dan merekalah yang mendukung Jepang dan dianggap penting, sedangkan arti genyumin (pribumi, inlander) yang diberikan oleh Jepang terhadap penduduk pedesaan sebagai golongan rakyat dianggap tidak berarti.

Pada umumnya banyak penduduk desa ketimbang dalam karesidenan Pekalongan keadaannya lebih buruk ketimbang penduduk kota, paling tidak sampai akhir tahun masa pendudukan. Hal ini tampaknya saling bertentangan. Kiranya sistem padi sawah tetap merupakan penyangga bagi mereka yang menguasai tanah dan panen serta yang biasa menyembunyikan beras setoran. Sekalipun hal itu mungkin benar demikian bagi segelintir kecil petani kaya, tetapi bagi petani menengah yang memiliki sawah satu bau atau kutan, jumlah beras yang tidak akan tahan lebih dari beberapa bulan setelah panen. Kondisi desa-desa selama masa-masa pendudukan sedemikian buruknya, sehingga rakyat berpaling kepada pengganti beras yang secara tradisional hanya dimakan pada masa kelaparan, antara lain singkong yang dijadikan bubur bolit. Selain itu banyak orang terpaksa makan umbi badur yang mula-mula harus dipotong tipis-tipis dan direndam dalam garam buat menghilangkan getahnya yang beracun. Bonggol pisang juga dimasak untuk dimakan, demikian pula daun kelapa yang disebut “bulung”.

Kondisi di pabrik-pabrik gula (yang diubah fungsinya) di masa romusha bekerja benar-benar menggambarkan kekejamannya. Di salah satu pabrik di Tegal para romusha mengenakan pakaian karung goni, dan tidak mendapatkan upah sepeser pun. Mereka bekerja sejak pukul 7 pagi sampai 5 sore, diantaranya membuat kecap, pelembungan makan yang tahan air dan juga kapal selam mini. Mereka harus mengangkut barang-barang yang berat, seperti misalnya untuk membalik sebuah kapal selam sepanjang 10 meter memerlukan 40 sampai 50 orang agar dapat dilakukan pengelasan dengan tepat. Salah satu kapal selam yang

mempunyai delapan silinder dan torpedo bergaris tengah 72 cm yang dibuat di luar karesidenan, dipasang di pabrik di Slawi. Romusha tidak menerima tambahan jatah untuk jenis pekerjaan semacam ini, jatah hariannya hanya nasi, singkong, dan jagung yang dibungkus dengan daun pisang. Sebaliknya, para ahli yang datang dari seluruh Jawa mendapatkan hak-hak istimewa (Lucas, 1989: 62).

Menjelang akhir masa pendudukan, petani kebanyakan tidak punya cukup kain kafan untuk membungkus jenazah, namun mereka tahu bahwa para pejabat yang korup itu menimbun kain yang berharga itu. Penguasa Jepang memaksa para Kepala Desa berperan sebagai tuan tanah, mengumpulkan padi secara paksa dari para petani untuk memenuhi jatah setoran yang telah ditetapkan untuk tingkat kabupaten; dan mereka pun harus membantu kecamatannya memenuhi jatah tenaga kerja pakasanya. Lebih-lebih lagi, karena musim hujan terlambat datang dan musim kemarau berkepanjangan, maka paceklik pun melanda Karesidenan Pekalongan menjelang akhir tahun 1944; orang-orang dilaporkan terpaksa memakan bekicot, bonggol pisang, dan tanaman hutan, bahkan tak sedikit yang mati kelaparan ditengah jalan.

Taraf hidup kalangan elite birokrasi dan Peta (tentara bantuan Indonesia ciptaan Jepang) berbeda secara mencolok dengan taraf hidup penduduk Karesidenan Pekalongan selebihnya. Kedua kelompok itu menerima jatah dan gaji yang cukup, lagi pula penguasa Jepang memberi kompi-kompi Peta suatu kekayaan seperti bebek, kambing, kolam, dan sawah untuk dikelola.

Selama dasawarsa akhir kekuasaannya, Belanda menjauhi golongan Islam dan mengganggu golongan nasionalis. Sebaliknya Jepang berusaha menggunakan

baik para tokoh agama dan nasionalis maupun elite birokrasi. Para pemimpin agama dan nasionalis menduduki jabatan penting dalam badan-badan bentukan Jepang seperti Putera (Pusat Tenaga Rakyat), Barisan Pelopor, dan Dewan Penasihat Karesidenan. Kendati begitu, pangreh praja tetap memonopoli birokrasi dan pangkat rendah dalam Peta. Menjelang akhir pendudukan Jepang, Agustus 1945, hubungan tradisional patron-klien antara birokrasi dan petani telah rusak, jika tidak hendak dikatakan telah hancur sama sekali. Sedangkan jurang sosio-ekonomis antara keleompok tersebut telah makin melebar. Pendapat yang menguasai kalangan kelas-kelas bawahan dalam tahun 1945 ialah, bahwa mereka telah dieksploatir oleh elite birokrasi; dengan adanya pendapat itu lahirlah pendirian “mereka akan membalas hal itu dikemudian hari” (Kahin, 1986: 33).

Tahun 1944 Bupati Mr. Moh Besar diangkat menjadi Residen Pekalongan dan untuk gantinya diangkat R. Sunaryo menjadi Bupati Tegal. R. Sunaryo berusaha untuk meringankan penderitaan rakyat, namun suasana yang tidak mengijinkan, maka cita-citanya tidak terlaksanan (Depdikbud, 1984: 68).

C. Situasi Awal Kemerdekaan

Tanggal 6 Agustus 1945 Hiroshima dibom atom oleh sekutu, dan tanggal 19 agustuds 1945 Nagasaki mendapat giliran dibom atom. Jepang akhirnya tanggal 15 Agustus 1945 menyerah kepada sekutu, namun tidak ingin melepaskan jajahan-jajahannya yang telah diduduki dengan pengorbanan yang tidak terbilang mudah.

Tanggal 16 Agustus 1945 jam 04.00 (pagi) Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Chaerul Saleh dan lain-lain menuju Rengasdengklok dan di Rengasdengklok

dibicarakan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Jam 08.00 (pagi) di Rengasdengklok dikibarkan bendera Merah putih dan dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tempatnya di balai Kawedanan Rengasdengklok. Pada hari Jum'at legi tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.15 diproklamkan Kemerdekaan Indonesia di Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta (Depdikbud, 1984: 68).

Revolusi Indonesia sudah dilancarkan dan mendapat reaksi hebat diseluruh pelosok Nusantara, meskipun tidak segera diketahui di Jakarta. Jepang langsung bereaksi. Atas perintah Panglima Angkatan Darat Jepang di Jawa, Maeda beserta seluruh stafnya dipenjarakan, dan pengumuman kemerdekaan yang dikirimkan melalui pos ke seluruh pelosok Nusantara dirobek oleh Kempetai. Pada hari berikutnya, Jepang mengumumkan pembubaran Peta, Heiho dan semua organisasi Indonesia bersenjata.

Dalam waktu enam minggu, bendera merah-putih sebagai simbol nyata dari kemerdekaan Indonesia telah berkibar di setiap golongan umum di Pulau Jawa. Para mahasiswa menjadi ujung tombak revolusi. Mereka memimpin anak-anak muda yang pernah menjadi anggota organisasi-organisasi pemuda yang disponsori Jepang tetapi kini telah dibubarkan. Bersama para pemuda tersebut, para mahasiswa merebut senjata dari orang Jepang, menyeret para perwira keluar dari mobil mereka, dan mengusir para fungsionaris Jepang dari gedung-gedung pemerintahan. Secara umum, pemuda dan mahasiswa mejadi kekuatan pendorong utama dibelakang Republik baru yang dipimpin oleh Soekarno (Kahin, 2013: 200).

Pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan oleh Soekarno dan diganti dengan Komite Indonesia Nasional Pusat yang kemudian dikenal dengan KNIP. Komite tersebut hanya bertugas sebagai suatu badan penasehat presiden beserta kabinetnya, dan tidak mempunyai fungsi legislatif. Dengan bantuan Hatta, Soekarno menunjuk 135 orang (termasuk mantan anggota PPKI) yang dianggap nasionalis terkemuka serta pemimpin-pemimpin paling penting dari kelompok etnis-etnis besar, agama, sosial, dan ekonomi di Indonesia untuk menjadi anggota KNIP.

Dengan dekrit yang dikeluarkan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, Indonesia sudah dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Soekarno menunjuk seorang gubernur untuk masing-masing provinsi dari kalangan penduduk setempat, dan KNIP memberikan mandat kepada salah satu anggota dari masing-masing daerah untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) di setiap provinsi guna membantu para gubernur dalam menjalankan pemerintahan.

Komite Indonesia Nasional setempat terbentuk secara cepat dan spontan di tingkat distrik maupun kotamadya. Selama satu periode yang lama, komite-komite setempat yang revolusioner itu berfungsi sebagai kekuatan administratif yang nyata di daerah masing-masing. Semula daerah-daerah itu diatur oleh pemimpin setempat yang diakui, tetapi sejak akhir November 1945, diatur menurut pola pengelolaan yang seragam yang sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Pola pergerakan itu disahkan di Pulau Jawa dan Madura melalui Peraturan

Pemerintah 23 November 1945 yang mengatur perihal pembentukan badan penasihat di semua karesidenan, distrik, kotamadya, dan wilayah-wilayah lain sebagaimana yang dirancang oleh Menteri Dalam Negeri (Kahin, 2013: 204).

Di bagian Pulau Jawa lainnya, pada tanggal 5 September Pemerintah Jakarta mengangkat para wakil residen semasa pendudukan Jepang menjadi Residen Republik, kecuali bagi Karesidenan Pekalongan. Residen Pekalongan baru diangkat tanggal 21 September, dan itu pun baru terjadi sesudah Komite Nasional Pekalongan mengajukan permohonan kepada Sekertaris Negara. Keragu-raguan pemerintah Pusat ini barangkali mencerminkan kenyataan bahwa wakil residen, Mr. Besar, tidak berasal dari kalangan pergerakan nasional maupun dari elite birokrasi seperti wakil-wakil residen yang lainnya. Bagaimanapun juga penangguhan pengangkatannya itu mengurangi wibawanya. Karesidenan itu pada umumnya orang beranggapan bahwa ia telah meragukan Proklamasi, atau pro-Belanda, atau kedua-duanya. Kedudukan Mr. Besar lebih jauh dirusak oleh macetnya perundingan penyerahan senjata polisi militer Jepang, *Kenpetai*, kepada pasukan Republik setempat. Di Tegal, pimpinan Komite Nasional berhasil mrundingkan penyerahan senjata dengan hanya seorang korban. Tetapi di Ibukota Karesidenan pertempuran berdarah pecah pada tanggal 3 Oktober sewaktu perundingan antara Residen Besar dengan pihak *Kenpetai* berlangsung (Kahin, 1986: 35).

Masa peralihan kekuasaan di Tegal pelaksanaannya diserahkan kepada KNI Daerah, dan Ketua KNI Kodya Tegal Ki Tjiptosatmoko dan ketua KNI Kabupaten Tegal Mas Slamet Reksoatmojo.

BKR diubah menjadi TKR dan terdiri dari bekas anggota Peta dan Heiho serta Seinendan, pembentukannya bertempat di kantor BP KKP (Badan Pembantu Kesejahteraan Keluarga Prajurit) cabang Tegal, terpilih sebagai Ketua Soewarto Reksosoebroto. Kantor kemudian dipindahkan ke Jalan Sultan Agung 18 Tegal. BKR laut dipimpin oleh Jacob Mangunkusumo. Sedang BKR Darat dipimpin oleh Pitoyo, Djumaeni dan Prawoto (Depdikbud, 1984: 71).

Pengibaran Bendera Merah Putih di Tegal pertama kali dilakukan di depan bengkel KA Tegal yang dipelopori oleh Rakhmat pegawai bengkel tersebut. Pada hari Raya Idul Fitri tanggal 6 September 1945 dan sampai dengan saat itu bendera Hinomaru Jepang masih berkibar seperti biasanya didepan kantor. Pada pagi hari pemuda-pemuda yang dipelopori oleh Rakhmat mengibarkan Bendera Merah Putih didepan halaman Bengkel KA Tegal dan sengaja selama satu hari satu malam tidak diturunkan, tetapi pada pagi harinya setelah kepala Bengkel KA/ seorang Jepang masuk kantor marah-marah dan Rakhmat dipanggil dan diperingatkan dengan keras sehingga terjadi perdebatan dengan sangat tegang, tetapi dipihak pemuda akhirnya mengalah sang saka Merah Putih diturunkan kembali dan digantikan dengan Hinomaru sebagaimana mestinya (Achmad, 1987: 3).

Pada tanggal 10 September 1945, dengan tiang bendera dari pipa besi panjang 13 m yang telah dipersiapkan sebelumnya berkibarlah sang saka Merah Putih di puncak Gedung Birao SCS Tegal yang dikibarkan oleh pemuda Moh Yunus dan Tjiptoardjo, dengan dikawal ketat oleh berpuluh-puluh pemuda bersenjata kelewang dan bertekad bulat apapun yang terjadi akan dihadapi agar

pengibaran sang saka Merah Putih kali ini jangan sampai mengalami kegagalan seperti waktu-waktu sebelumnya. (Tiang benderanya sampai sekarang masih tetap utuh).

Satu jam kemudian seorang Kenpetai datang dengan muka sangat meyeramkan dan memerintahkan kepada rombongan pemuda yang menjaganya, supaya segera menurunkan kembali sang saka Merah Putih, maka dengan sikap tegas perintah tersebut ditolak, dengan mengatakan bila Tuan Kenpetai berani silahkan turunkan sendiri tetapi bila nanti terjadi ada buntut peristiwanya pihak pemuda tidak akan bertanggung jawab, mendengar jawaban demikian dengan muka merah akhirnya Kenpetai kembali pergi.

Setelah diketahui bahwa pihak Kenpetai mempunyai titik-titik kelemahan, maka timbul keberanian dikalangan pemuda untuk melanjutkan aksi-aksinya dan pada hari berikutnya dengan kendaraan truk mulai mengadakan demonstrasi pengibaran bendera Merah Putih di kantor-kantor instansi pemerintahan dan yang pertama kali didatangi di pabrik Texin Tegal dan menyusul kantor perikanan, orang-orang Jepang yang pada waktu itu berada di kantor menyaksikan sendiri Bendera Hinomaru diturunkan dan digantikan dengan Merah Putih, tidak berani berbuat apa-apa bahkan buru-buru pergi meninggalkan kantornya.

Tetapi sewaktu rombongan pemuda yang berkendara truk dalam perjalanan pulang dibuntuti oleh seorang Kenpetai yang berkendara sepeda motor dan ditengah jalan truk tersebut diberhentikan dan diperintahkan untuk berbelok menghadap markas Kenpetai, tetapi perintah tersebut ditolak oleh pemuda dan menyuruh Kenpetai untuk datang di kantor KNI, mendengar jawaban

demikian kenpetai menjadi marah dan mencabut pistol, namun di pihak pemuda tidak gentar bahkan saling berloncatan dari atas truk dan mengepung Kenpetai sehingga menjadi ketakutan dan pergi.

Pada hari berikutnya tanggal 12 September 1945 demonstrasi pengibaran Bendera Merah Putih dilanjutkan keluar kota Tegal, dengan kendaraan truk menuju Adiwerna, Slawi dan berbelok ke Pangkah dan selama perjalanan sambil mengobarkan semangat perjuangan dengan pekik Kemerdekaan dan menganjurkan kepada rakyat, bila sewaktu-waktu menjumpai orang Jepang dimana saja mereka berada supaya beramai-ramai ditangkap dan dilucuti senjatanya. Dengan menggeloranya semangat perjuangan Kemerdekaan dikalangan rakyat, maka sejak saat itu pihak Jepang mulai curiga dan Kenpetai mulai bertindak melucuti senjata-senjata yang masih ada di Kepolisian Negara, kejadian pelucutan senjata tersebut menimbulkan kemarahan rakyat, semangat perjuangan menjadi meluap-luap sulit untuk dikendalikan dan terjadi peristiwa yang pertama kalinya.

Serombongan pemuda menyeret 2 orang Jepang dari rumah tempat tinggalnya di jalan Gilitugel dan beramai-ramai mereka dibawa ke Desa Randugunting, kemudian sesampainya dirumah pegadaian Debong Tengah 2 orang Jepang tersebut dibunuh secara beramai-ramai oleh massa rakyat dan segera dikuburkan di pekuburan Cleret. Maka sejak terjadinya peristiwa tersebut, semua orang Jepang yang semula bertempat tinggal terpencar-pencar di daerah Kota Tegal, dengan diam-diam mulai mengkosongkan rumah tempat tinggalnya dan

berkumpul menjadi satu di Markas Kenpetai, dua orang Jepang yang dibunuh adalah pimpinan dari pabrik Texin Tegal.

Sebagai puncak kemarahan rakyat, dengan semangat juang yang tinggi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 20 September 1945 markas Kempetai yang berlokasi di bekas Hotel Strk (sekarang jalan Veteran) Tegal dikepung dan diserbu oleh rakyat, yang didahului demonstrasi pemuda keliling Kota Tegal yang dipimpin oleh Pamudji adik Moh Jusup.

Dengan dipelopori oleh Kadarman dan tokoh-tokoh pemuda, seluruh kekuatan di kerahkan, Kepolisian Negara, bekas Peta-Heiho, bekas Kaibodhan Laut dan masa pemuda berduyun-duyun saling berdatangan terus-menerus dengan membawa berbagai senjata tajam, bergerak mengepung Markas Kenpetai, sedangkan keadaan Markas Kenpetai itu sendiri telah berkumpul orang-orang Jepang baik sipil maupun militer dan masih memegang senjata.

Pengepungan dilakukan dengan ketat, dari sebelah timur/belakang oleh Kepolisian Negara, sebelah timur/depan oleh bekas Peta-Heiho bersama rakyat dengan teriakan serbu-serbu! Bunuh semua orang Jepang sambil melemparkan batu ke atap genteng markas Kenpetai tersebut. Ada seorang pemuda dari Desa Panggung, menaiki tembok disebelah timur/belakang dengan maksud melemparkan sesuatu benda kedalam markas, namun dengan tidak disangka bahwa dibelakang ada seorang Jepang yang sedang mengambil air sumur, maka ditembaklah pemuda tersebut dengan pistol tadi, peluru tepat menembus diperutnya, seketika jatuh tergeletak dan gugur seketika.

Pada pagi hari itu jam 09.00 Mr. Iskak Tjokrohadisurjo, Wakil Residen Banyumas selaku anggota Panitia Pelucutan senjata Jepang datang dari Purwokerto ke Tegal dan perundingan segera dimulai. Semula tempat perundingan direncanakan di sebuah gedung yang sekarang ditempati Perwal Tegal, tetapi pihak kenpetai menolak dan mengusulkan agar tempat perundingan diadakan ditempat yang agak jauh dari markas kenpetai yang dikepung, akhirnya tempat perundingan ditentukan dirumah kediaman R Soengeb Wali Kota Tegal, di Jalan Gilitugel dan untuk pengamanan dalam perjalanan bagi delegasi Kenpetai, Kenpetai minta untuk dijemput Mardjono Wakil Ketua KNI Kota Tegal.

Perundingan dimulai dan berjalan lancar, telah dicapai kata sepakat bahwa pihak Jepang bersedia menyerahkan semua senjatanya kepada pihak pemuda dengan syarat, agar semua orang Jepang dijamin keselamatannya terutama yang berada di markas Kenpetai.

Setelah perundingan selesai pada hari itu juga semua senjata Jepang diserahkan kepada delegasi pemuda yang diwakili oleh R Soepetro dan Kadarman.

Kemudian kesemua orang Jepang dikeluarkan dari Markas Kenpetai yang berjumlah 75 orang dan digiring/dikawal oleh pemuda menuju ke stasiun Kereta Api Tegal, untuk selanjutnya dibawa ke Purwokerto.

Jenis senjata yang sudah diserahkan: 1 Mitraliyur berat dan 2 senjata otomatis Lywis lengkap dengan pelurunya. Beberapa pucuk senjata Jepang dan pistol. Senjata tersebut kemudian dibagi-bagikan sebagian kepada Kepolisian

Negara dan sebagian lagi kepada bekas Peta-Heiho termasuk Mitraliyur berat dan Lywis (Achmad, 1987: 10).

Maka sejak itulah tanggal 21 September 1945, kekuasaan Pemerintah Daerah Tegal berada sepenuhnya ditangan bangsa sendiri

- Walikota Tegal : Reksonegoro Soengeb Reksoatmodjo
- Bupati Tegal : Reksonegoro S. Soemaryo
- Wedana Tegal : Reksonegoro Basrun
- Camat Tegal : Reksonegoro Soepetro

